

# LAPORAN KINERJA 2023

**INSPEKTORAT II**

**INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KELAUTAN  
DAN PERIKANAN**





## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 ini disusun sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat II dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern selama Tahun Anggaran 2022. Laporan ini disusun dari hasil pengukuran kinerja untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai. Lebih lanjut, informasi kinerja dalam laporan ini berfungsi sebagai pengendalian atas perkembangan capaian kinerja Inspektorat II dan menjadi bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja kedepan.

Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi pengelolaan dan peningkatan kinerja Inspektorat II dan Inspektorat Jenderal KKP.

Jakarta, 18 Januari 2023  
Inspektur II



Ir. Lutfi

## RINGKASAN EXECUTIVE

Sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat II menjalankan mandat untuk melaksanakan pengawasan intern yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan kementerian. Agar dapat berkontribusi secara efektif dalam memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan KKP, pengawasan intern dilaksanakan dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan terukur dengan mengacu kepada standar pengawasan yang berlaku. Tidak hanya itu, Inspektorat II juga menerapkan praktik-praktik terbaik yang berkembang seiring dengan pembelajaran dari hasil evaluasi internal maupun dari organisasi lain (eksternal). Mengingat keterbatasan sumber daya pengawasan yang ada, Inspektorat II harus memfokuskan pengawasan pada hal-hal yang signifikan dan berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi. Dalam hal ini, pengawasan intern berbasis risiko merupakan pendekatan terbaik yang dapat digunakan untuk menghadapi keterbatasan dan tantangan tersebut. Untuk itu, dalam melaksanakan pengawasan intern, Itjen mengedepankan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi yang memiliki risiko tinggi dan menjadi perhatian publik dan/atau pimpinan KKP.

Dalam rangka pencapaian tujuan, program yang ditetapkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat II tahun 2023 adalah “Program Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan Kelautan dan Perikanan”. Keberhasilan Program ini diukur melalui pencapaian 3 Sasaran Strategis dengan 14 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari 14 IKU tersebut, sebanyak 12 capaian IKU melampaui target yang ditetapkan, sedangkan pencapaian atas 2 IKU lainnya sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan kondisi capaian ini, nilai kinerja organisasi Itjen yang ditunjukkan dengan Nilai rata-rata Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) mencapai 107,46%.

Beberapa capaian kinerja Inspektorat II yang meraih capaian positif dalam mendukung kinerja KKP antara lain a) Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat II sebesar 0,10% dari total realisasi anggaran mitra, b) Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat II mendapat Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,56, c) Unit Kerja Mitra Inspektorat II Berpredikat Menuju WBK bertambah menjadi 29 Unit, dan d) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat II berpredikat A (82,64).

Pencapaian kinerja program tersebut dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya anggaran sebesar Rp4.081.385.330,- atau 99,99% dari alokasi anggaran Rp4.081.644.000, . Penggunaan sumber daya anggaran ini dapat dinilai cukup efisien karena dengan *input* anggaran yang lebih kecil (99,99%) dapat dihasilkan kinerja yang melebihi target (NPSS: 107,46%). Dengan demikian, efisiensi anggaran yang dapat dihasilkan mencapai 7,46%.

Efisiensi anggaran ini dapat dicapai oleh Inspektorat II sebagai hasil dari optimalisasi hari pengawasan yaitu dengan menggabungkan beberapa subjek pengawasan (yang memungkinkan) dalam satu kali perjalanan dinas pengawasan. Selain itu, tercapainya efisiensi juga dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan dan penerapan pengawasan berbasis resiko yang memungkinkan pengawasan Itjen lebih tepat sasaran.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EXECUTIVE</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. TUGAS DAN FUNGSI</b> .....	<b>2</b>
<b>B. STRUKTUR ORGANISASI</b> .....	<b>3</b>
<b>C. ISU STRATEGIS ATAU FOKUS PENGAWASAN TAHUN 2023</b> .....	<b>4</b>
<b>BAB II. PERJANJIAN DAN PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>6</b>
<b>A. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2024</b> .....	<b>6</b>
1. Visi Inspektorat Jenderal KKP.....	6
2. Misi Inspektorat Jenderal KKP .....	6
3. Tujuan .....	7
4. Sasaran Strategis.....	7
<b>B. RENCANA KINERJA TAHUNAN</b> .....	<b>7</b>
<b>C. PERJANJIAN KINERJA LEVEL 2 TAHUN 2023</b> .....	<b>8</b>
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>10</b>
<b>A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI</b> .....	<b>10</b>
<b>B. ANALISIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN</b> .....	<b>30</b>
1. Realisasi Anggaran Kegiatan.....	30
2. Realisasi Anggaran per Sasaran Kinerja .....	30
3. Analisis Kualitas Penggunaan Anggaran (Efisiensi) .....	31
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	<b>32</b>
<b>A. KESIMPULAN</b> .....	<b>32</b>
<b>B. PERMASALAHAN</b> .....	<b>32</b>
<b>C. RENCANA PERBAIKAN</b> .....	<b>33</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat II .....	4
Tabel 2. Penetapan Kinerja Inspektorat II .....	8
Tabel 3. Capaian Kinerja Inspektorat II Tahun 2023 .....	10
Tabel 4. Rincian Realisasi IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” Tahun 2023 .....	12
Tabel 5. Perbandingan Capaian Nilai Temuan Materialitas KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 6. Perbandingan Tingkat Maturitas Mitra Inspektorat II Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 7. Unit Kerja Mitra Inspektorat II Berpredikat WBK.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 8. Perbandingan Capaian Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Inspektorat II Tahun 2023 dengan tahun 2022 dan Target Tahun 2024 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 9. Hasil Penilaian Mandiri Evaluasi SAKIP Tahun 2023	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 10. Perbandingan Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat II Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024 .....	17
Tabel 11. Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup KKP Tahun 2023 .....	18
Tabel 12. Perbandingan Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat II Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024.....	19
Tabel 13. Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN.....	20
Tabel 14. Perbandingan Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat II Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024 .....	20
Tabel 15. Tingkat Efektivitas Pengawasan PBJ lingkup Mitra Inspektorat II Tahun 2023 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 16. Perbandingan Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat II Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 17. Data Rekapitulasi Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP” Tahun 2023.	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

Tabel 18. Perbandingan Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat II Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 19. Perbandingan Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat II (rekomendasi) Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 20. Perbandingan Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat II Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 21. Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat II Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 22. Tingkat Kepatuhan Terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat II Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 23. Perbandingan Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat II Tahun 2023 dengan Tahun 202 dan Target Tahun 2024 .....	29
Tabel 24. Realisasi Anggaran per Sasaran Kinerja Realisasi Anggaran Kegiatan .....	31





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dari Nawa Cita yang telah ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden, setidaknya terdapat dua agenda yang terkait langsung dengan peran Inspektorat Jenderal. Agenda tersebut adalah terkait “Perbaikan tata kelola pemerintahan” (agenda kedua) dan terkait “Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi” (agenda kelima).

Pertama, perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi isu penting dan pemerintah secara terus menerus telah melakukan perubahan sistem dan kebijakan dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain dapat dilihat dari penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi.

*Kedua*, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi juga strategis karena dampak negative dari korupsi akan juga berpengaruh terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, hal tersebut belum optimal. Masih terdapat permasalahan pada tatanan birokrasi, seperti pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang dan maraknya praktek KKN, rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektivitas kerja, serta masih rendahnya kualitas pelayanan umum.

Untuk itu, diperlukan upaya keras dan sistematis untuk memperbaikinya. Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting. Diperlukan juga terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan.

Selaras dengan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP) berkewajiban untuk memberikan kontribusi dan kinerja terbaik untuk mewujudkan dua dari lima agenda pembangunan nasional, yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan serta pemberantasan korupsi melalui akuntabilitas kinerja organisasi.

### **B. DASAR HUKUM**

Inspektorat Jenderal KKP melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan :

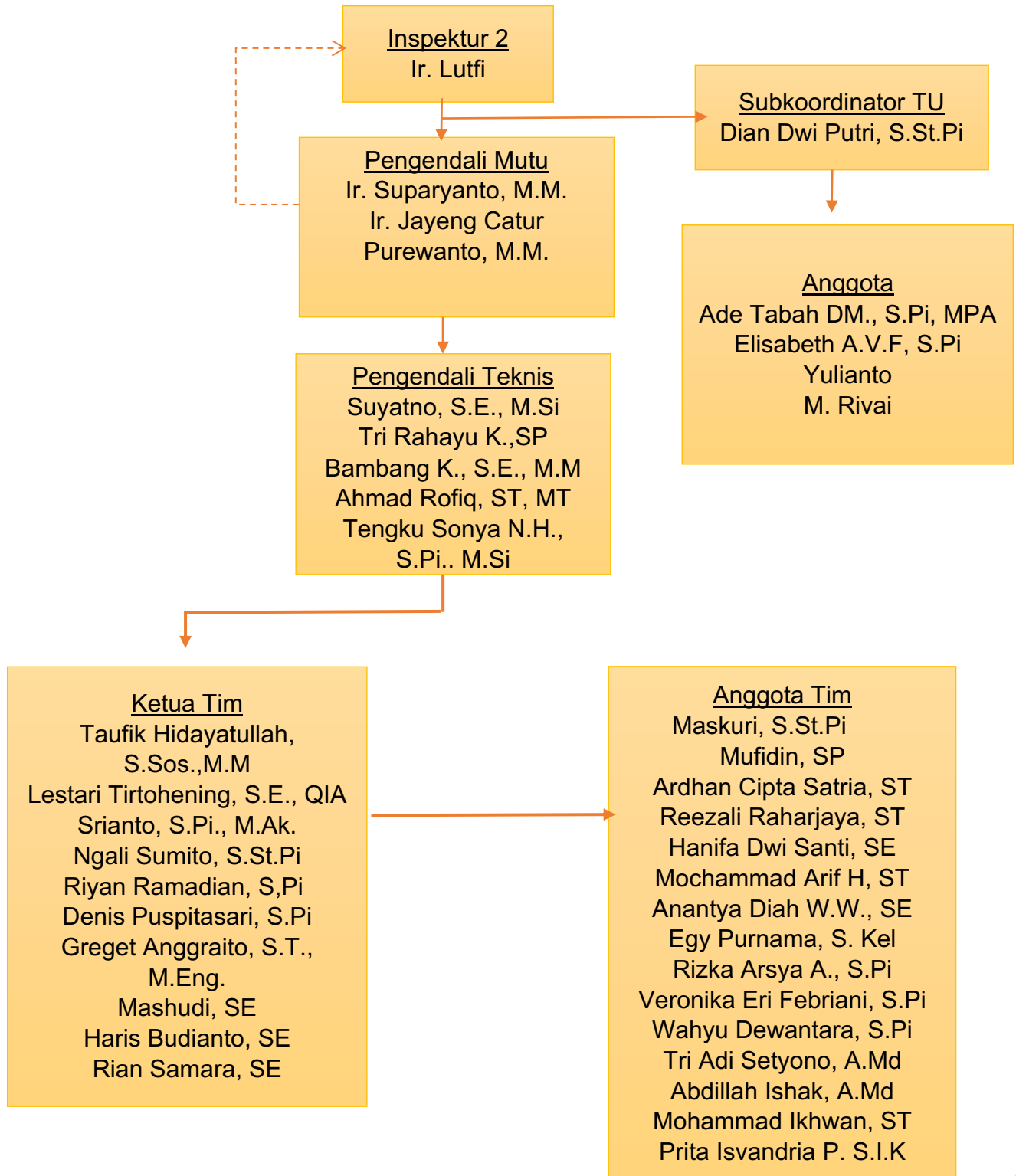
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7/PERMEN-KP/2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

### **C. TUGAS DAN FUNGSI**

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan dan administrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP, serta seluruh UPT lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP;
- b. Penyusunan rencana program pengawasan intern lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP, serta seluruh UPT di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP;
- c. Pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan non keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP, serta seluruh UPT di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP;
- d. Koordinasi pelaporan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik;
- e. Pelaporan hasil pengawasan; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Inspektorat II.

#### D. STRUKTUR ORGANISASI



Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Inspektorat II pada Tahun 2023 sebanyak 39 orang dengan rincian sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat II**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Inspektur II	1 Orang
2.	Auditor Utama	2 Orang
3.	Auditor Madya	5 Orang
4.	Auditor Muda	10 Orang
5.	Auditor Pertama	11 Orang
6.	Auditor Penyelia	1 Orang
7.	Auditor Pelaksana Lanjutan	1 Orang
8.	Calon Auditor	2 Orang
9.	Subkoordinator Tata Usaha/APKAPBN Muda	1 Orang
10.	APKAPBN Pertama	1 Orang
11.	Analisis Perencanaan	1 Orang
12.	Analisis Keuangan	1 Orang
13.	Analisis Tata Usaha	1 Orang
14.	Tenaga kontrak/driver	1 Orang
Total		39 Orang

#### **E. ISU STRATEGIS ATAU FOKUS PENGAWASAN TAHUN 2023**

Isu strategis atau fokus pengawasan Tahun 2023 yang diemban oleh Inspektorat II adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Kegiatan Prioritas Bidang Kelautan dan Perikanan Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap:
  - a. Kapal Ikan
  - b. Alat Tangkap
  - c. Kampung Nelayan Maju
  - d. Timbangan Elektronik
  - e. Operasionalisasi SKPT pada Mitra Inspektorat II
2. Pengawasan Kegiatan Prioritas Bidang Kelautan dan Perikanan Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP:

- a. Operasional Kapal Pengawas dan *Speedboat* Pengawasan
  - b. Operasional Pesawat Patroli (*Airborne Surveillance*)
  - c. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan
  - d. Pengadaan Kapal Pengawas
  - e. Perawatan Kapal Pengawas dan *Speedboat* Pengawasan
  - f. Penanganan Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP), Barang Bukti TPKP dan Awak Kapal Pelaku TPKP
  - g. Implementasi Permen KP Nomor 12/PERMEN-KP/2020
3. Pengawasan Kinerja Manajerial pada Mitra Inspektorat II
    - a. Reformasi Birokrasi
    - b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
    - c. Pelayanan Publik
    - d. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
    - e. Penanganan Benturan Kepentingan
  4. Pengawasan Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Mitra Inspektorat II
  5. Pemantauan Tindak Lanjut pada Mitra Inspektorat II
  6. Pengawasan Tematik/Mandatory pada Mitra Inspektorat II
    - a. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)
    - b. Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PA dan PBJ)
    - c. Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (LK dan BMN)
    - d. Laporan Kinerja (LKj)
    - e. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
    - f. Bantuan Pemerintah (Banper)
    - g. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN)
      - h. Pertanggungjawaban Keuangan
      - i. Manajemen Risiko (MR)
      - j. Pengarusutamaan Gender (PUG)

## BAB II PERJANJIAN DAN PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2024

Rencana Strategis Itjen KKP mengalami beberapa perubahan disesuaikan dinamika organisasi. Perubahan terakhir, terkait penajaman Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) di lingkungan KKP. Adapun visi-misi Itjen Renstra 2020 – 2024 dapat disampaikan sebagai berikut:

#### 1. Visi Inspektorat Jenderal KKP

Didasarkan pada visi KKP tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan visi Presiden Tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini dapat diartikan bahwa KKP mendukung penuh Visi Presiden khususnya dalam hal pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Dukungan KKP dalam bentuk visi tersebut juga menjadi acuan bagi Itjen KKP dalam menentukan arah pengawasan internal selama kurun 5 (lima) tahun pada periode pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024.

Sebagai unsur pengawas intern di lingkungan KKP, visi Itjen KKP juga disusun untuk mendukung Visi Presiden secara umum dan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Oleh karena itu dirumuskan Visi Inspektorat Jenderal KKP pada tahun 2020-2024 adalah

***“Terwujudnya KKP yang Berintegritas dan Akuntabel dalam Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”.***

Visi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keinginan seluruh pegawai Itjen KKP dan komitmen pimpinan yang kuat terhadap pemerintahan yang berorientasi pada hasil, bersih dan berwibawa dengan menjunjung tinggi prinsip *good governance* dan *clean government*.

#### 2. Misi Inspektorat Jenderal KKP

Dari 4 (empat) misi Presiden yang dijalankan oleh KKP yaitu misi ke-1 “peningkatan kualitas manusia Indonesia”; misi ke-2 “struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan

berdaya saing”; misi ke-4 “mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan”; dan misi ke-8“ pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”, Itjen KKP melaksanakan 1 (satu) misi terkait dengan misi ke-8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Mengacu pada tugas, fungsi dan peran Itjen KKP serta misi Presiden ke-8 yang dijalankan oleh KKP, terdapat 3 (tiga) misi Itjen KKP tahun 2020-2024, dengan uraian sebagai berikut:

- 1. Memberikan pengawasan intern terbaik untuk peningkatan kinerja KKP;**
- 2. Mendorong pengendalian intern yang efektif terhadap sistem dan tata kelola KKP; dan**
- 3. Mendorong terwujudnya sumber daya aparatur KKP yang berintegritas dan berorientasi pelayanan prima.**

### **3. Tujuan**

Dalam menjabarkan visi dan misi Itjen KKP tahun 2020-2024, maka tujuan pengawasan intern terhadap pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu:

- a. Terwujudnya kinerja KKP yang efektif dan efisien;
- b. Terciptanya suatu sistem dan tata kelola KKP yang baik; dan
- c. Terwujudnya budaya integritas di lingkungan KKP.

### **4. Sasaran Strategis**

Sasaran strategis merupakan suatu ukuran pencapaian dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun sasaran strategis Inspektorat II pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat II
- b. Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat II.
- c. Dukungan Manajemen Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat

## **B. RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Sebagai wujud pelaksanaan Program Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP pada Tahun 2023, Inspektorat II melaksanakan kegiatan Pengawasan Intern pada Mitra dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.774.224.000,00 dengan rencana output Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II sebanyak 3 Laporan dan Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra dengan alokasi anggaran sebesar Rp307.420.000,00 dengan output 1 Laporan. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut antara lain:



1. Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.774.224.000,00 terdiri atas:
  - a. Pelaksanaan Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.825.016.000,00;
  - b. Pengawasan Akuntabilitas Non Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp782.658.000,00;
  - c. Dukungan Operasional Pengawasan pada Mitra Inspektorat II dengan alokasi anggaran sebesar Rp165.550.000,00;
2. Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat II dengan alokasi anggaran sebesar Rp307.420.000,00.

### C. PERJANJIAN KINERJA LEVEL 2 TAHUN 2023

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang hendak dicapai dalam pengawasan pembangunan kelautan dan perikanan, telah ditetapkan target tiap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja berbentuk Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 sebagaimana disampaikan pada Tabel 2 berikut.

**Tabel 2. Penetapan Kinerja Inspektorat II**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Tata Kelola pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat II	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat II	≤ 1%
		2	Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat II	3,1 (Nilai)
		3	Unit Kerja Mitra Inspektorat II berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi)	27 Unit
		4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat II	80,50 (A)
2	Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat II	5	Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat II	81%
		6	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat II	81%
		7	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat II	81%
		8	Persentase Pelaksanaan Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat II	75%

		9	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat II	4 Dokumen
		10	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat II	88%
		11	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat II	80%
3	Dukungan Manajemen Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat II	12	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat II	100%
		13	Terkelolanya Anggaran Kegiatan SEcara Tertib dan Akuntabel lingkup Inspektorat III	100%

Dapat disampaikan bahwa pada Triwulan IV telah dilakukan revisi dokumen Perjanjian Kinerja untuk perubahan Indikator Kinerja PMPRB. Sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor: 938/SJ.1/RC.610/XI/2023, Tanggal 1 November 2023, tentang Hasil Pembahasan Indikator Kinerja (IK) Manajerial, telah disepakati bahwa IKU PMPRB tidak lagi dicantumkan dalam dokumen PK unit kerja. Hal ini dilakukan sehubungan dengan ditetapkannya Revisi Road Map Reformasi Birokrasi (RB) KKP Tahun 2020-2024 pada bulan November 2023, yang telah memuat 25 indikator pembentuk RB General sehingga IKU PMPRB tidak perlu lagi untuk dicantumkan.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan kedalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis/kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan oleh Tim Pengelola Kinerja Inspektorat II untuk melaksanakan pengumpulan data kinerja, kemudian mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala setiap 3 bulan. Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang telah diperjanjikan. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis website di [kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id).

Pada Tahun 2022, Sasaran kinerja Inspektorat II terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) yang diukur keberhasilan pencapaiannya melalui capaian 14 Indikator Kinerja Utama (IKU). secara umum dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Tahun 2023 telah memenuhi target yang ditetapkan. Capaian kinerja ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3. Capaian Kinerja Inspektorat II Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Tata Kelola pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat II	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat II	≤ 1%	0,098%	120%	Capaian melebihi target
		2	Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat II	3,1 (Nilai)	3,561	114,8%	Capaian melebihi target

		3	Unit Kerja Mitra Inspektorat II berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi)	27 Unit	29 Unit	107,4%	Capaian melebihi target
		4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat II	80,5 (A)	82,64%	102,6%	Capaian melebihi target
2	Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat II	5	Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat II	81%	88,842%	109,68%	Capaian melebihi target
		6	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat II	81%	90,75%	112%	Capaian melebihi target
		7	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat II	81%	88,89%	109,7%	Capaian melebihi target
		8	Persentase Pelaksanaan Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat II	75%	86,81%	115,75%	Capaian melebihi target
		9	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat II	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	Capaian sesuai target
		10	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat II	88%	95,97%	109,06%	Capaian melebihi target
		11	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat II	80%	98,22%	120%	Capaian melebihi target
3	Dukungan Manajemen Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat II	12	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat II	100%	100%	100%	Capaian sesuai target
		13	Terkelolanya Anggaran Kegiatan SEcara Tertib dan Akuntabel lingkup Inspektorat III	100%	100%	100%	Capaian sesuai target

Analisis atas capaian kinerja terhadap IKU tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

### SS-1: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat II

SS ke-1 “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat II” pada Level II didukung oleh 4 (empat) IKU yaitu

1. IKU-1 “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat II”
2. IKU-2 “Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat II (Level)”
3. IKU-3 “Unit Kerja Mitra Inspektorat II Berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi)”
4. IKU-4 “Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat II”.

Pada Tahun 2023, dilakukan pengukuran terhadap keempat IKU tersebut dengan gambaran sebagai berikut:

**IKU 1 : Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat II**

IKU ini menggambarkan jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi KKP atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi anggaran KKP tahun 2023. Pengukuran IKU ini dengan menggunakan Polarisasi *Minimize* (semakin kecil lebih baik). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” sebesar 0,01%, realisasi tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar  $\leq 1\%$ . Adapun rincian capaian dari masing-masing Eselon I lingkup KKP disampaikan sebagai berikut :

**Tabel 4. Rincian Realisasi IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” Tahun 2023**

No	Unit Kerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Nilai Temuan BPK (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1	Ditjen Perikanan Tangkap	721.340.693.780	1.222.068.168	$\leq 1$	0,17%	199,83
2	Ditjen PSDKP	775.747.149.360	258.553.779	$\leq 1$	0,03%	199,97
<b>TOTAL</b>		<b>1.497.087.843.140</b>	<b>1.480.621.947</b>	<b><math>\leq 1</math></b>	<b>0,098%</b>	<b>199,99</b>

Adapun keberhasilan capaian IKU ini didukung oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat II antara lain Probitas Audit, Audit Kinerja, Pengawasan Pengelolaan Keuangan, Reviu Penganggaran, Reviu LK, Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan, Pengawasan Penyerapan Anggaran, Pengawasan Pengelolaan BMN, Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa, PTL hasil pemeriksaan BPK dan Pengawasan Tematik Lainnya (Kegiatan Prioritas, PNBK, dll)

Jika dibandingkan dengan pencapaian IKU ini dengan Tahun 2022, IKU capaian nilai temuan materialitas KKP Tahun 2023 tidak mengalami perubahan (capaian melebihi target). Hal ini disebabkan karena kinerja yang baik dari Inspektorat II dalam mendampingi Mitra dalam penyelesaian setiap temuan eksternal KKP.

Dalam rencana jangka menengah 2020-2024, target IKU ini ditetapkan sebesar  $\leq 1\%$  setiap tahun (stabilized), begitu juga pada periode sebelumnya. Oleh karena itu, jika

dibandingkan dengan target 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah maka kondisi capaian akan sama dengan kondisi tahun ini ( $\leq 1\%$ ).

**Tabel 5. Perbandingan Capaian Nilai Temuan Materialitas KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP	$\leq 1\%$	0,01%	120	$\leq 1\%$	0,01	120	$\leq 1\%$	0,01	120

**IKU-2 :Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat II**

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Tingkat Maturitas SPI mitra kerja diperoleh dari hasil evaluasi BPKP. Dalam hal BPKP tidak melakukan evaluasi terhadap maturitas SPI KKP pada Tahun 2023, maka data capaian IKU ini dapat diambil dari hasil pengukuran mandiri tim internal KKP (Inspektorat Jenderal) dengan menggunakan pedoman dari BPKP.

Hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022/2023 yang dilakukan oleh Tim Asesor KKP telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal dengan simpulan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “terdefinisi” atau tingkat 3 dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar “3,561”. Nilai capaian IKU ini pada Tahun 2023 merupakan adopsi langsung dari nilai maturitas SPIP KKP karena penilaian dilakukan secara terintegrasi di lingkungan KKP sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah.

Dengan tingkat maturitas “terdefinisi”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan

dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif, sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan berada pada Level 3 (terdefinisi).

Dalam rencana jangka menengah 2021-2024, capaian Tahun 2023 sedikit lebih rendah dari target jangka menengah yang ditetapkan pada Level 3 dengan nilai 3,9 di Tahun 2024.

**Tabel 6. Perbandingan Tingkat Maturitas Mitra Inspektorat II Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat II	3,0	3,81	120%	3,1	3,561	118%	3,9	3,561	91,3%

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan ke tingkat optimum, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus memiliki Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan proses bisnis dan proses perencanaan organisasi, melakukan identifikasi dan analisis probabilitas praktik korupsi pada kegiatan utama organisasi, melakukan pengambilan keputusan berdasarkan manajemen risiko, dan meningkatkan kompetensi pegawai terkait manajemen risiko, serta mengimplementasikan tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja dan risiko strategis unit kerja eselon I dan kementerian.

**IKU-3 :Unit Kerja Mitra Inspektorat II Berpredikat Menuju WBK  
(jumlah akumulasi)**

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar komponen penilaian yang meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat memperoleh hasil penilaian indikator proses dan indikator hasil  $\geq 75$  sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pencapaian jumlah unit kerja berpredikat menuju WBK pada tahun 2023 diperoleh dari hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V). Capaian jumlah unit kerja berpredikat WBK Tahun 2023 pada unit Eselon I dibuktikan dengan SK Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP sesuai pedoman yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Inspektorat Jenderal KKP.

Jumlah Unit Kerja Mitra Inspektorat II yang berpredikat menuju WBK secara akumulatif sebanyak 29 satker dari target sebanyak 25 satker, sehingga capaian IKU ini adalah 107,4% atau terdapat penambahan sebanyak 4 satker pada Tahun 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5 berikut,

**Tabel 7. Unit Kerja Mitra Inspektorat II Berpredikat WBK**

<b>Unit Kerja Mitra Inspektorat II Berpredikat WBK</b>		
	<b>Ditjen Perikanan Tangkap</b>	
1	Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan/Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan	WBK TPN 2016
2	PPN Pemangkat	WBK TPN 2015
3	BBPI Semarang	WBK MKP 2017
4	PPN Sibolga	WBK MKP 2017
5	Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	WBK MKP 2019
6	Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	WBK MKP 2019
7	Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat	WBK MKP 2019
8	Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	WBK MKP 2020
9	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan	WBK MKP 2020
10	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan	WBK MKP 2020
11	Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	WBK MKP 2021
12	Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	WBK MKP 2021
13	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu	WBK MKP 2022
14	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan	WBK MKP 2023
15	Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	WBK MKP 2023
	<b>Ditjen PSDKP</b>	
1	Pangkalan PSDKP Bitung	WBK MKP 2018
2	Pangkalan PSDKP Benoa	WBK MKP 2019
3	Pangkalan PSDKP Jakarta	WBK MKP 2019
4	Pangkalan PSDKP Tual	WBK MKP 2020
5	Pangkalan PSDKP Batam	WBK MKP 2020
6	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak	WBK MKP 2021
7	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo	WBK MKP 2021
8	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan	WBK MKP 2021



9	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap	WBK MKP 2021
10	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna	WBK MKP 2022
11	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan	WBK MKP 2022
12	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang	WBK MKP 2022
13	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon	WBK MKP 2023
14	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak	WBK MKP 2023

Jika dibandingkan pencapaian IKU ini dengan tahun 2022, IKU capaian Unit Kerja berpredikat menuju WBK Mitra Inspektorat II tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1%, yaitu dari 108,70% menjadi 107,4% dari sisi persentase, hal tersebut dikarenakan target pada Tahun 2022 masih rendah dan target Tahun 2023 meningkat. Namun dari sisi jumlah capaian unit kerja tetap sama yaitu 4 unit kerja yang mendapat predikat WBK.

Adapun jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian tahun 2023 telah mencapai 93,54% dari target 31 unit kerja (penambahan 2 unit kerja setiap tahun) yang ditetapkan pada tahun 2024. Hal tersebut dilihat pada tabel 6 berikut,

**Tabel 8. Perbandingan Capaian Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Inspektorat II Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Realisasi 2023	%
Capaian Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK	23	25	108,7	25	29	107,4	31	29	93,54

Untuk terus meningkatkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK pada Mitra Inspektorat II, maka perlu dilaksanakan kegiatan asistensi, sosialisasi dan pemantauan pada satker lingkup mitra Inspektorat II.

**IKU-4 :Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat II**

Nilai penilaian mandiri SAKIP merupakan ukuran atas tingkat kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan KKP. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja KKP diperoleh dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

Hasil Penilaian Mandiri Mitra Inspektorat II (Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP) adalah sebesar 82,64 (A) dari Target 80,5 (A). Sehingga, capaian target Mitra Inspektorat

II menjadi terpenuhi. Hasil penilaian mandiri evaluasi SAKIP Tahun 2023 pada mitra Inspektorat II yaitu sebagai berikut,

**Tabel 9. Hasil Penilaian Mandiri Evaluasi SAKIP Tahun 2023**

No.	Unit Kerja	Hasil Evaluasi	Target
1.	Ditjen Perikanan Tangkap	82,94 (A)	80,5 (A)
2.	Ditjen PSDKP	82,35 (A)	80,5 (A)
Rata-Rata Capaian		82,64	80,5 (A)

Nilai capaian IKU Tahun 2023 yaitu sebesar 82,64 (102,6%) dengan Target 80,5. Jika dibandingkan dengan capaian IKU Tahun 2022, terdapat peningkatan sebesar 1,67 poin atau 1,45%. Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Tahun 2024 dengan target yang telah ditetapkan sebesar 85 (A), perlu adanya peningkatan/optimalisasi pemenuhan komponen manajemen kinerja. Perbandingan Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat II Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut,

**Tabel 10. Perbandingan Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat II Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat II	80,01	80,97	101,2	80,5	82,64	102,65	85	82,64	97,22

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian IKU tersebut antara lain Reviu Laporan Kinerja, Asistensi SAKIP dan Evaluasi Implementasi SAKIP.

**SS-2: Pengawasan Intern yang Handal Pada Mitra Inspektorat II**

SS ke-2 “Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat II” pada Level II didukung oleh 7 (tujuh) IKU yaitu

1. Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat II
2. Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat II

3. Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat II
4. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat II
5. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat II (rekomendasi)
6. Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat II
7. Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat II

Pada Tahun 2023, dilakukan pengukuran terhadap ketujuh IKU tersebut dengan gambaran sebagai berikut,

**IKU-5 : Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat II**

Suatu ukuran yang menggambarkan kualitas kinerja pengawasan intern KKP dalam pengawalan pelaksanaan kegiatan program prioritas/strategis mitra kerja. Kegiatan mitra/unit eselon I dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: 1. memiliki dampak langsung kepada masyarakat; 2. memiliki anggaran besar; 3. mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP; 4. mendukung pencapaian prioritas nasional; 5. merupakan arahan direktif presiden; dan 6. pertimbangan lainnya yang relevan.

Pada Mitra Inspektorat II, yang dilaksanakan Pengukuran Tingkat Efektifitas Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis yaitu pada Ditjen Perikanan Tangkap, sedangkan pada Ditjen PSDKP tidak terdapat kegiatan Prioritas/Strategis.

Pengukuran IKU dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2023 dengan capaian nilai sebesar 88,84% dari target sebesar 81%. Tingkat efektifitas pengawasan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah diukur dengan menggabungkan tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah dengan hasil Capaian Tingkat Efektifitas Pengawasan PBJ lingkup KKP Tahun 2023.

**Tabel 11. Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup KKP Tahun 2023**

Unit Kerja Eselon I	Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Bantuan Pemerintah	Efektivitas Pengawasan PBJ	Efektivitas Pengawasan Kegiatan Prioritas/ Bantuan Pemerintah
DJPT	90,39	86,52	88,84

Bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 sebesar 95,72% dari target 80%, capaian Tahun 2023 menunjukkan penurunan namun tetap melebihi target. Hal tersebut dikarenakan perbedaan jenis bantuan antara Tahun 2022 dengan Tahun 2023 dimana pada tahun 2022 hanya berupa alat penangkapan ikan dan vessel monitoring aid, sedangkan pada Tahun 2023 terdapat bantuan berupa Kapal dan Mesin Kapal. Capaian ini bila dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian tahun 2023 mencapai 110% dari target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 82%.

**Tabel 12. Perbandingan Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat II Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Tingkat Efektifitas Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat II	80%	95,72%	119,65	81%	88,84%	111,59	82%	90,39%	109,6

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU ini antara lain Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Lingkup KKP TA 2023 yang dilakukan secara terpadu oleh masing-masing Inspektorat.

**IKU-6 : Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat II**

Suatu ukuran yang menggambarkan kualitas kinerja pengawasan intern KKP dalam pengawalan pelaksanaan pengelolaan BMN lingkup mitra Inspektorat. Pada tahun 2023, Tingkat Efektivitas Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan BMN ditargetkan mencapai 81%. Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Itjen KKP pada masing-masing unit eselon I lingkup KKP dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023
- b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang

- c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2023
- d. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian
- e. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Pengukuran IKU dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2023 dengan capaian nilai sebagai berikut,

**Tabel 13. Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN**

No.	Unit Kerja	Nilai (%)					
		Indikator 1*)	Indikator 2**)	Indikator 3***)	Total	IKU	Target 2023
1.	Ditjen Perikanan Tangkap	20,00	38,00	26,50	81,50	90,75	81,00
2.	Ditjen PSDKP	20,00	40,00	40,00	100,00		

Keterangan :

\* = Kualitas Perencanaan Pengawasan

\*\* = Kualitas Pelaksanaan Pengawasan

\*\*\* = Nilai rata-rata tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I

Jika dibandingkan pencapaian IKU ini dengan tahun 2022, IKU capaian Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat II tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 4,77%, yaitu dari 114,48% menjadi 109,68% yang dapat dilihat pada tabel 16 berikut. Hal ini disebabkan adanya peningkatan target di Tahun 2023.

**Tabel 14. Perbandingan Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat II Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Tingkat Efektifitas Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat II	72,0%	83,00%	114,48	81,00%	90,75%	109,68%	80%	90,75%	113,43%

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU 7 ini antara lain Reviu Rencana Kebutuhan BMN, Reviu Usulan Perubahan RKBMN, Pemantauan Pengelolaan BMN dan Evaluasi Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN pada mitra Inspektorat II.

**IKU-7 : Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat II**

Suatu ukuran yang menggambarkan kualitas kinerja pengawasan intern KKP dalam pengawalan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup KKP. Pengukuran IKU dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2023 dengan target sebesar 81%. Hasil Pengukuran IKU Efektivitas Pengawasan PBJ Mitra Inspektorat II Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 13 sebagai berikut,

**Tabel 15. Tingkat Efektivitas Pengawasan PBJ lingkup Mitra Inspektorat II Tahun 2023**

No.	Unit Kerja	Nilai (%)					
		Indikator 1*)	Indikator 2**)	Indikator 3***)	Total	IKU	Target 2023
1.	Ditjen Perikanan Tangkap	16,70	30,00	37,36	84,06	88,89	81
2.	Ditjen PSDKP	18,35	40,00	35,36	93,71		

Keterangan :

\* = Kualitas Perencanaan Pengawasan

\*\* = Kualitas Pelaksanaan Pengawasan

\*\*\* = Nilai rata-rata tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa

Jila dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian IKU Tahun 2023 mengalami peningkatan 1,25% yaitu dari semula Tahun 2022 dengan realisasi sebesar 87,64% menjadi 88,89% dengan metode penghitungan yang sama. Sedangkan jika dibandingkan dengan Target Tahun 2024, masih mencapai target yaitu 108,4%. Rincian perbandingan tingkat efektifitas pengawasan pengadaan barang/jasa dapat dilihat pada Tabel 14 berikut,

**Tabel 16. Perbandingan Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat II Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat II	80%	87,64%	109,55	81%	88,89%	109,74	82%	88,89%	108,4

Terkait pencapaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan IKU dimaksud pada tahun berikutnya, antara lain mendorong Unit Eselon I untuk:

1. Mengumumkan seluruh paket pengadaan melalui penyedia dalam aplikasi SIRUP;
2. Melengkapi kontrak berbentuk surat perjanjian dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
3. Melaksanakan pengadaan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
4. Melakukan penyelesaian penandatanganan kontrak berbentuk surat perjanjian agar tidak melewati bulan Juni tahun berjalan;
5. Menyelesaikan kontrak berbentuk surat perjanjian tepat waktu sesuai jangka waktu pada kontrak/surat perjanjian; dan
6. Menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan pengadaan barang/jasa.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU 8 ini antara lain Penilaian Efektifitas Pengelolaan PBJ Tahun 2023.

**IKU-8 : Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat II**

IKU ini menggambarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit s.d. Triwulan IV Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan.

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) ditargetkan sebanyak 75% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.

Berdasarkan hasil pengukuran IKU sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti atau dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja oleh mitra kerja Inspektorat II mencapai 86,81%, dari target sebesar 75% sehingga persentase capaian IKU terhadap target adalah 115,75%. Rincian capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel 15 berikut,

**Tabel 17. Data Rekapitulasi Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP” Tahun 2023**

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% (Tuntas)	Sisa Rekomendasi	% (sisa Rekomendasi)
1.	Ditjen Perikanan Tangkap	368	301	81,79	67	18,21
2.	Ditjen PSDKP	140	140	100	0	0
	Total	508	441	86,81	67	13,19

Jika dibandingkan pencapaian IKU ini dengan tahun 2022, IKU capaian Presentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat II Tahun 2023 mengalami penurunan Realisasi sebesar 4,97%, yaitu dari 91,78% menjadi 86,81% namun jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 (80,00%), realisasi Tahun 2023 masih terpenuhi. Rincian perbandingan persentase tersebut dapat dilihat pada tabel 16 berikut,

**Tabel 18. Perbandingan Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat II Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Tingkat Efektifitas Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat II	70%	91,78%	120	75%	86,81%	115,7	80%	86,81%	108,51

Hasil capaian IKU 9 tersebut diatas menunjukkan bahwa Mitra Inspektorat II (DJPT dan DJPSDKP) menindaklanjuti temuan dengan cukup baik (melebihi target) dan



pemantauan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Inspektorat II dilakukan secara intensif. Selain itu terdapat aplikasi Sistem Informasi Data Tindak Lanjut yang memudahkan mitra untuk menindaklanjuti temuan melalui aplikasi tersebut secara online.

Kegiatan yang dilakukan Inspektorat II untuk mendukung capaian IKU tersebut yaitu Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen pada Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP, Koordinasi/Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan baik secara internal maupun eksternal Itjen KKP dan Layanan Tindak Lanjut Online melalui Aplikasi SIDAK.

**IKU-9 : Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan  
Lingkup Mitra Inspektorat II (rekomendasi)**

Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan adalah rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat kepada seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan untuk melakukan perubahan, penambahan dan/atau penyempurnaan peraturan, kebijakan, maupun sistem dan prosedur administrasi/operasi.

Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan yang diberikan kepada mitra kerja sesuai dengan target masing-masing Inspektorat pada perjanjian kinerja. Pada Tahun 2023, target Inspektorat II adalah 4 rekomendasi kebijakan.

Cara pengukurannya adalah melihat jumlah kajian/rekomendasi yang dilakukan oleh masing-masing Inspektorat terhadap peraturan/kebijakan/sistem/prosedur operasional mitra kerja atau unit kerja lainnya yang dilaksanakan dan disampaikan pada Tahun 2023.

Berdasarkan hasil pengukuran IKU sampai dengan Triwulan IV, capaian jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan yang sudah dicapai sebanyak 4 (empat) rekomendasi, yang berarti telah mencapai target 100%.

Jika dibandingkan pencapaian IKU ini dengan tahun 2022, IKU capaian Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat II tahun 2023 tetap tercapai, yaitu dari 100% yang dapat dilihat pada tabel 21 berikut. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kinerja Inspektorat II dalam memberikan rekomendasi kebijakan mitra.

**Tabel 19. Perbandingan Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat II (rekomendasi) Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	2021			2022			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Tingkat Efektifitas Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat II	4	5	120	4	4	100	4	4	100

Adapun 4 (empat) rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup mitra Inspektorat II selama Tahun 2023 yaitu

1. Masukan atas Penggunaan Harga Patokan Ikan
2. Masukan/saran terhadap Kegiatan Evaluasi Observer dan Pembahasan Draft Petunjuk Teknis Pemantauan di Atas Kapal Perikanan TA 2023
3. Pertimbangan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan Setelah 31 Desember 2022
4. Saran dan Masukan Tindak Lanjut Pemanfaatan KM. Inka Mina 868

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target IKU 10 ini adalah pengawasan (reviu)/kajian terhadap peraturan, kebijakan, sistem dan prosedur administrasi/operasi lingkup mitra kerja Inspektorat II.

**IKU-10 : Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat II**

IKU ini menggambarkan jumlah penugasan dan pelaporan hasil pengawasan meliputi audit dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat pada mitra kerja yang memenuhi standar penilaian sesuai Pedoman Evaluasi Kendali Mutu Inspektorat Jenderal.

Jumlah pelaksanaan dan pelaporan hasil pengawasan meliputi audit dan evaluasi yang memenuhi standar mutu pengawasan pada Inspektorat II dengan target minimal 88% dari jumlah kegiatan pengawasan (audit dan evaluasi) yang dilaksanakan pada Tahun 2023. Pengukuran dilaksanakan dengan menilai pelaksanaan pengawasan (audit dan evaluasi) yang telah dilakukan penilaian berjenjang dan pelaporan hasil pengawasan (audit dan evaluasi) yang telah sesuai dengan standard dilingkup KKP.

Pada Semester I Tahun 2023, Inspektorat V selaku Tim Evaluasi Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan

telah melaksanakan Evaluasi terhadap Inspektorat II dengan perolehan nilai Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat II sebesar 97,87% dari target 88%, sedangkan pada Semester II Tahun 2023, hasil Evaluasi terhadap Inspektorat II memperoleh nilai sebesar 94,06% dari target 88%. Hasil Penilaian secara Tahunan yaitu adalah sebesar 95,97% yang berarti telah melebihi target 88%.

Jika dibandingkan pencapaian IKU ini dengan Tahun 2022, IKU capaian Presentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Inspektorat II tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 3,6%, yaitu dari 99,57% menjadi 95,97% yang dapat dilihat pada tabel 18 berikut. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan teknologi sistem informasi pengawasan baru yaitu Simwas, sehingga pembuatan kendali mutu laporan masih terkendala penyempurnaan aplikasi. Perbandingan Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat II Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 18 berikut,

**Tabel 20. Perbandingan Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat II Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat II	87%	99,57%	114,45%	88%	95,97%	109,05%	89%	95,97%	107,8%

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian target IKU 11 adalah supervisi berjenjang pada setiap pelaksanaan pengawasan dan monitoring Implementasi Kendali Mutu Pengawasan (AMS), dan evaluasi atas implementasi Kendali Mutu Pengawasan setiap semester dikoordinasikan oleh Inspektorat V untuk menjaga pelaksanaan dan pelaporan pengawasan tetap sesuai dengan standar mutu pengawasan.

**IKU-11 : Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT  
Lingkup Inspektorat II**

Merupakan jumlah pelaksanaan penugasan pengawasan lingkup Inspektorat yang mengacu kepada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023. Jumlah pelaksanaan pengawasan lingkup Inspektorat yang sesuai dengan PKPT Tahun 2023 dengan target kesesuaian sebesar 88%.

Pada Semester I Tahun 2023, Inspektorat V selaku Tim Evaluasi Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT telah melaksanakan Evaluasi terhadap Inspektorat II dengan perolehan nilai Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat II sebesar 97,5% dari target sebesar 80%, sedangkan pada Semester II Tahun 2023, Hasil Evaluasi terhadap Inspektorat II memperoleh nilai sebesar 98,94% dari target 88%. Hasil Penilaian secara Tahunan yaitu adalah sebesar 98,22% yang berarti telah melebihi target 80%.

Jika dibandingkan pencapaian IKU ini dengan tahun 2022, IKU capaian Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat II Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,78%, yaitu dari 100% menjadi 98,22% yang dapat dilihat pada tabel 19 berikut. Hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan pada Mitra Inspektorat II sehingga membuat PKPT Inspektorat II tidak terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

**Tabel 21. Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat II Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat II	80,00%	100%	120	80,00%	98,22%	120	80,00%	98,22%	120

Tingkat kepatuhan PKPT lingkup Inspektorat II dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan capaian IKU ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pimpinan, Direktif Menteri, Pemotongan anggaran serta realisasi capaian kegiatan mitra.

**IKU-12 : Tingkat Kepatuhan Terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat II**

IKU ini menggambarkan Tingkat Kepatuhan Terhadap Penganggaran, dan pengelolaan di lingkungan Inspektorat yang berjalan secara tertib dan sesuai aturan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

Dari target 100%, diperoleh capaian sebesar 100%, yang diperoleh dari persentase ROK bulanan yang disampaikan ke Bagian Keuangan dan Umum yang tepat waktu, pengisian aplikasi triwulanan dan tersedianya laporan kinerja Interim Triwulanan semuanya sebesar 100%.

Jika dibandingkan pencapaian IKU ini dengan Tahun 2022, pencapaiannya tidak ada perubahan dan selalu mencapai target yang dapat dilihat pada Tabel 24 berikut ini.

**Tabel 22. Tingkat Kepatuhan Terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat II Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Tingkat Kepatuhan Terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat II	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Capain IKU 13 ini dari tahun ke tahun relatif tercapai 100% menunjukkan bahwa penyusunan dan penyampaian pengisian aplikasi e-monev Bappenas, pengisian capaian kinerja pada aplikasi kinerja, penyampaian data Laporan Kinerja Interim, penyampaian data capaian kinerja tahunan kepada Sekretaris Itjen dan penyampaian ikhtisar hasil pengawasan mitra Inspektorat II telah tercapai semuanya sebesar 100%.

**IKU-13 : Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat II**

IKU ini menggambarkan pengelolaan anggaran pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat yang berjalan secara tertib dan sesuai aturan dalam mendukung tugas dan fungsi Inspektorat. Terselenggaranya pengelolaan anggaran di lingkungan Inspektorat

secara tertib dan akuntabel yang ditunjukkan dengan tersedianya Rencana Kegiatan dan Anggaran Bulanan serta Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran secara tepat waktu. Pada tahun 2022, pemenuhan kedua bukti pengelolaan anggaran tersebut ditargetkan 100% tersedia secara tepat waktu.

Pengukuran IKU dilakukan dengan melakukan penilaian atas Pengelolaan Rencana Kegiatan dan Anggaran (A): Rencana Kegiatan dan Anggaran bulanan yang disampaikan kepada Bagian Keuangan selambatnya pada minggu pertama bulan berjalan (bobot 100%) Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran (B): Laporan Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Anggaran bulanan yang disusun selambatnya pada minggu ke dua bulan selanjutnya setelah pelaksanaan anggaran. Capaian IKU ini dapat diukur dari rata-rata realisasi A dan B.

Dari target 100%, diperoleh capaian sebesar 100%, yang dihasilkan dari Rencana Kegiatan dan Anggaran bulanan dan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran yang disampaikan tepat waktu.

Jika dibandingkan pencapaian IKU ini dengan Tahun 2022, pencapaiannya tidak ada perubahan dan selalu mencapai target yang dapat dilihat pada Tabel 25 berikut ini.

**Tabel 23. Perbandingan Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat II Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat II	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Capaian IKU 14 dari tahun ke tahun selalu tercapai 100% dari target. Hal ini menunjukkan terkelolanya anggaran di lingkungan Inspektorat II secara tertib dan akuntabel yang didukung dengan penyampaian Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) bulanan kepada Sekretariat Itjen serta penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengelolaan Anggaran secara tepat waktu 100%.

## **B. ANALISIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN**

### **1. Realisasi Anggaran Kegiatan**

Inspektorat II mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4.081.644.000,- untuk menghasilkan 1 (satu) output (keluaran) yaitu Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II sebanyak 2 laporan. Untuk mencapai output tersebut dibagi menjadi 3 kegiatan utama sebagai berikut:

1. Pengawasan Intern Mitra Inspektorat II, yaitu dengan anggaran Rp3.608.674.000,.  
Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp3.608.643.730,- .
2. Dukungan Operasional Pengawasan pada Mitra Inspektorat II, yaitu dengan anggaran Rp165.550.000,-.  
Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp165.549.500,- .
3. Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat II, yaitu dengan anggaran Rp307.420.000,-.  
Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp307.192.100,- .  
Sehingga total realisasi anggaran Inspektorat II sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.081.385.330,- atau 99,99% dari pagu sebesar Rp4.081.644.000,-.

### **2. Realisasi Anggaran per Sasaran Kinerja**

Sebagai implementasi kinerja berbasis anggaran, maka anggaran operasional Inspektorat II dirancang untuk mencapai target seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai parameter tercapainya SS dan tujuan. Namun, perlu disampaikan bahwa pola rancangan anggaran Inspektorat II dalam mencapai target indikator kinerja memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan unit eselon I lainnya. Dalam hal ini, kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat II dapat memiliki ruang lingkup yang meliputi pengawasan pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, akuntabilitas manajemen kinerja, reformasi birokrasi, dan tema lainnya. Informasi keuangan terkait dengan pencapaian Sasaran Kinerja (strategis) Itjen tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 24. Realisasi Anggaran per Sasaran Kinerja Realisasi Anggaran Kegiatan**

SASARAN KINERJA	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
1. Tata Kelola pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat II 2. Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat II	Pengawasan Intern Mitra Inspektorat II	3.774.224.000	3.774.193.230	99,99
	Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat II	307.420.000	307.192.100	99,99
<b>TOTAL</b>		<b>4.081.644.000</b>	<b>4.081.385.330</b>	<b>99,99</b>

### 3. Analisis Kualitas Penggunaan Anggaran (Efisiensi)

Pengukuran kinerja **Value for money** pada organisasi sektor publik dapat membuat keseimbangan antara pengukuran hasil dengan pengukuran proses. Indikator efektivitas dalam **Value for money** berorientasi pada hasil dan lebih bersifat kualitatif, sedangkan indikator ekonomis dan efisiensi lebih berorientasi pada proses dan lebih bersifat kuantitatif.

Tingkat Efisiensi atas pelaksanaan anggaran program pengawasan Inspektorat II tahun 2023 dapat dilihat dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja yang meliputi capaian *output* dan capaian kinerja organisasi.

Efisiensi Capaian Kinerja *Output* berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran dengan *output* yang dihasilkan, diketahui bahwa realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp4.081.385.330,- sehingga terdapat efisiensi sebesar 0,01% dalam menghasilkan *output* dengan optimal.

Efisiensi Capaian Kinerja Organisasi Bila dibandingkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) yang merupakan rata-rata capaian kinerja organisasi tahun 2023, diketahui bahwa sumber daya anggaran Inspektorat II digunakan secara efisien karena dengan *input* anggaran yang lebih kecil 0,01% dapat menghasilkan kinerja yang melebihi target (NPSS: 107,46%). Dengan demikian, efisiensi anggaran atas pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan (NPSS) sebesar 7,46%.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Itjen tahun 2023 antara lain:

1. Pengukuran kinerja Inspektorat II periode Tahun 2023 telah dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *kinerjaku.kkp.go.id* dan dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Itjen KKP Tahun 2023 cukup memuaskan. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) atau nilai rata-rata kinerja organisasi yang mencapai 107,46% dan secara umum capaian kinerja Inspektorat II di atas target sehingga perlu dipertahankan/ditingkatkan.
2. Pengukuran kinerja pada aplikasi *kinerjaku.kkp.go.id* Tahun 2023 sebanyak 13 IKU seluruhnya mencapai target, dengan 10 IKU yang melebihi target 100% dan 3 IKU yang mencapai target 100%. Terdapat revisi dokumen Perjanjian Kinerja untuk perubahan Indikator Kinerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), sehingga ada 1 IKU yang dihapus dari pengukuran kinerja.
3. Beberapa capaian kinerja Inspektorat II yang meraih capaian positif dalam mendukung kinerja KKP antara lain:
  - a. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat II sebesar 0,01% dari total realisasi anggaran mitra.
  - b. Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat II mendapat Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,56.
  - c. Unit Kerja Mitra Inspektorat II Berpredikat Menuju WBK bertambah menjadi 29 Unit.
  - d. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat II berpredikat A (82,64%).
4. Total realisasi anggaran Inspektorat II sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.081.385.330,- atau 99,99% dari pagu sebesar Rp4.081.644.000,-. Dari total realisasi anggaran tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran Inspektorat II cukup efisien karena dengan penggunaan anggaran yang tersedia dapat menghasikan capaian melebihi dari target.

### **B. PERMASALAHAN**

Pada dasarnya seluruh target Indikator Kinerja pada Tahun 2023 telah terpenuhi dan melebihi target, namun terdapat catatan yang harus diperhatikan khususnya pada revisi Perjanjian Kinerja untuk perubahan Indikator Kinerja Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), sehingga ada 1 IKU yang dihapus dari pengukuran kinerja.

### **C. RENCANA PERBAIKAN**

Untuk terus mengoptimal capaian IKU Inspektorat II, perlu dilakukan beberapa rencana aksi yaitu diantaranya,

1. Menyusun skala prioritas dalam penentuan kegiatan dan anggaran.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi lainnya dalam pelaksanaan pengawasan intern.
3. Meningkatkan koordinasi dengan mitra Inspektorat II dan melaksanakan pemantauan secara periodik/sesuai kebutuhan untuk mengawal kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja tahunan maupun jangka menengah.